

## **Model Tata Kelola Kolaboratif untuk Wirausaha Muda di Kabupaten Bogor**

**Wahyudi Chaniago<sup>1</sup>, Endeh Suhartini<sup>2</sup>, Saprudin<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [Wahyudisurat2@gmail.com](mailto:Wahyudisurat2@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [endeh.suhartini@unida.ac.id](mailto:endeh.suhartini@unida.ac.id)<sup>2</sup>,

[Saprudin@unida.ac.id](mailto:Saprudin@unida.ac.id)<sup>3</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 19 Maret 2026

**Revised:** 31 Maret 2026

**Accepted:** 06 April 2026

**Published:** 11 April 2026

**Keywords:** Collaborative Governance, Digital Capacity, Multi-Stakeholder Collaboration, Youth Entrepreneurship, Bogor Regency

**Kata Kunci:** Tata Kelola Kolaboratif, Kapasitas Digital, Kolaborasi Multipihak, Wirausaha Muda, Kabupaten Bogor

---

### **Abstract**

*This study examines how collaborative governance can be structured to strengthen youth entrepreneurship in Bogor Regency. Previous studies mostly emphasize entrepreneurship education, digital entrepreneurship, or micro and small enterprise development, while local models of multi-stakeholder collaboration remain underexplored. This research used a descriptive qualitative case study in Bogor Regency. Data were collected through in-depth interviews with 11 purposively selected informants from local government, youth organizations, young entrepreneurs, and academia, supported by observation and program data. The analysis followed the interactive model of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings show that collaboration has emerged but remains fragmented. Digital communication is widely used, yet no integrated platform connects actors. Digital capability is uneven, organizational culture is still affected by sectoral ego and bureaucratic rigidity, trust is moderate but fragile, and shared goals are not fully translated into joint action. This study proposes a collaborative model built on five linked dimensions: integrated communication technology, sustained digital capacity building, collaborative culture, institutionalized trust, and formalized shared goals.*

---

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dapat dibangun untuk memperkuat pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Kajian terdahulu umumnya menitikberatkan pada pendidikan kewirausahaan, kewirausahaan digital, atau pengembangan usaha mikro dan kecil, sedangkan model kolaborasi multipihak pada level lokal masih relatif terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Kabupaten Bogor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha muda, dan akademisi, serta didukung observasi dan data program. Analisis dilakukan dengan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berlangsung, tetapi masih terfragmentasi. Teknologi komunikasi telah digunakan secara luas, namun belum tersedia platform terintegrasi yang menghubungkan para aktor. Kapasitas digital masih timpang, budaya organisasi masih dipengaruhi ego sektoral dan kekakuan birokrasi, kepercayaan antarpihak belum kokoh, dan tujuan bersama belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam aksi bersama. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi yang dibangun atas lima dimensi yang saling terkait, yaitu teknologi komunikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas digital berkelanjutan, budaya kolaboratif, kepercayaan yang terlembagakan, dan tujuan bersama yang diformalkan.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## **Pendahuluan**

Wirausaha muda menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan inovasi, dan perluasan basis ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, urgensi pengembangan wirausaha muda semakin kuat karena rasio wirausaha nasional masih relatif rendah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang berwirausaha pada pertengahan 2023 baru mencapai 3,47%, lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga, sedangkan partisipasi kelompok usia muda masih terbatas (Badan Pusat Statistik, 2023). Pada saat yang sama, wirausaha muda diharapkan menjadi salah satu jawaban atas persoalan pengangguran dan tantangan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks. Singgih (2020) menegaskan bahwa pengusaha muda berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan kerja, dan inovasi, tetapi peran tersebut tidak dapat berkembang optimal tanpa dukungan ekosistem yang memadai.

Masalahnya, potensi wirausaha muda sering tidak sejalan dengan kapasitas dan dukungan kelembagaan yang mereka terima. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa generasi muda masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan keterampilan manajerial, akses pembiayaan, dan literasi digital, hingga lemahnya dukungan kebijakan dan jaringan usaha (Ahmed & Ahmed, 2021; Cueto et al., 2022). Dalam ranah pendidikan, kewirausahaan telah diakui penting untuk membentuk pola pikir, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan inovatif generasi muda (Ahmad et al., 2023; Bauman & Lucy, 2021; Kim et al., 2020). Namun, penekanan yang terlalu besar pada pendidikan formal atau pelatihan individual belum selalu diikuti dengan penguatan tata kelola lintas-aktor yang menopang keberlanjutan usaha.

Kajian terdahulu cenderung bergerak pada tiga arus utama. Pertama, studi tentang pendidikan kewirausahaan yang menekankan pentingnya kurikulum, pengalaman belajar, dan pembentukan mindset kewirausahaan (Ahmad et al., 2023; Bauman & Lucy, 2021; Kim et al., 2020). Kedua, studi tentang kewirausahaan digital yang menyoroti peluang pasar, pemanfaatan teknologi, dan hambatan digital di negara berkembang (Ahmed & Ahmed, 2021; Rizal et al., 2022). Ketiga, studi tentang strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menempatkan pelatihan, akses modal, dan digitalisasi sebagai instrumen utama penguatan daya saing usaha (Siti et al., 2024).

Meskipun penting, sebagian besar studi tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan akademisi dapat dihubungkan dalam suatu desain kolaborasi yang operasional, terukur, dan berkelanjutan. Padahal, kajian literatur menunjukkan bahwa kewirausahaan pemuda sangat bergantung pada konteks dan memerlukan pendekatan multipihak untuk mengatasi hambatan yang bersifat lintas sektor (Ćóćkalo et al., 2020).

Kabupaten Bogor merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan beragam, sekaligus menghadapi kebutuhan nyata untuk memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan kewirausahaan muda. Temuan tesis menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pelatihan kewirausahaan pemuda, tetapi perluasan program belum otomatis menghasilkan integrasi tata kelola. Data program justru memperlihatkan bahwa intervensi masih cenderung menekankan jumlah peserta dan variasi pelatihan, sementara mekanisme kolaborasi antarpemangku kepentingan belum terbentuk secara sistematis. Kesenjangan ini penting karena pengembangan wirausaha muda tidak cukup hanya didorong melalui pelatihan sesaat, tetapi memerlukan koordinasi, pendampingan, pembagian peran, serta kepercayaan yang terus dipelihara.

Penelitian ini menggunakan perspektif *collaborative governance* yang menekankan pentingnya desain kelembagaan, proses interaksi, dan kepemimpinan fasilitatif dalam kerja sama lintas aktor (Ansell & Gash, 2008). Untuk menajamkan analisis, penelitian ini juga menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi menurut Poon dan Zhang (2013), yaitu teknologi komunikasi, keterampilan digital, budaya organisasi, kepercayaan antar anggota, dan tujuan bersama. Kelima faktor tersebut dipilih karena sesuai dengan konteks pengembangan wirausaha muda yang kini semakin dipengaruhi transformasi digital, kebutuhan koordinasi lintas lembaga, serta tuntutan kolaborasi yang tidak hanya formal tetapi juga adaptif. Dari perspektif jaringan, efektivitas kolaborasi juga ditentukan oleh kualitas hubungan antarpelaku, kekuatan koneksi, dan kelancaran aliran sumber daya serta informasi (Provan & Kenis, 2008).

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kontribusi para aktor dalam kolaborasi tata kelola multipihak, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta merumuskan model kolaborasi yang efektif untuk pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Kontribusi ilmiah utama penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola kolaboratif yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal, dengan menempatkan dimensi digital bukan sekadar alat bantu, melainkan elemen struktural yang menentukan efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memotret kondisi kolaborasi yang telah berjalan, tetapi juga

menawarkan sintesis model yang lebih operasional bagi penguatan ekosistem wirausaha muda di tingkat daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam praktik nyata kolaborasi multipihak dalam pengembangan wirausaha muda pada satu konteks wilayah tertentu, yaitu Kabupaten Bogor (Denzin & Lincoln, 2018; Yin, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris kolaborasi, mengidentifikasi hambatan dan peluang, serta menyusun model tata kelola yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan sumber data utama berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM, organisasi kepemudaan KNPI, pelaku usaha muda, dan akademisi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan relevansi mereka terhadap isu penelitian (Sugiyono, 2016). Jumlah informan sebanyak 11 orang, yang terdiri atas satu Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, satu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, lima perwakilan KNPI tingkat kecamatan, dua pelaku usaha muda dari sektor kuliner dan fashion, serta satu akademisi dari Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah data program. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan penilaian informan terhadap praktik kolaborasi yang berjalan (Kvale, 1996). Observasi dilakukan untuk memahami konteks interaksi dan pelaksanaan program kewirausahaan di lapangan (Marshall & Rossman, 2016). Selain itu, penelitian memanfaatkan data program pelatihan pengembangan kepemudaan yang dimiliki instansi terkait sebagai bahan penguatan analisis. Pengumpulan data lapangan berlangsung pada tahun 2025, terutama pada tahap persiapan, pengumpulan data, wawancara, dan observasi, sementara pengolahan serta penyusunan laporan berlanjut hingga awal 2026.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, deskripsi kontekstual, audit proses penelitian, dan penegasan objektivitas temuan sebagaimana dikemukakan Lincoln dan Guba (1985). Dengan rancangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman analitis yang kuat mengenai

dinamika kolaborasi multipihak dalam pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor.

## Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor telah memiliki upaya nyata dalam mendorong pengembangan wirausaha muda melalui berbagai program pelatihan. Data pelatihan pengembangan kepemudaan selama 2023-2025 memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah daerah cukup aktif dan variatif, tetapi belum seluruhnya terhubung dengan pola kolaborasi yang terintegrasi.

**Tabel 1. Data Pelatihan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Bogor Tahun 2023-2025**

<b>Program</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Total</b>
Kewirausahaan	380	539	360	1.279
Foodpreneur	285	539	270	1.094
Sosiopreneur	80	180	90	350
Kewirausahaan Khusus	0	72	50	122
Bisnis Online	45	180	270	495
Ecopreneur	80	60	285	425
Creativepreneur	0	0	180	180
<b>Jumlah</b>	<b>870</b>	<b>1.570</b>	<b>1.505</b>	<b>3.945</b>

*Sumber: data penelitian diolah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, 2025.*

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah peserta meningkat tajam dari 870 orang pada 2023 menjadi 1.570 orang pada 2024, lalu relatif stabil pada 1.505 orang pada 2025. Program dengan partisipasi tertinggi adalah kewirausahaan umum dan *foodpreneur*, sedangkan program seperti *creativepreneur* dan kewirausahaan khusus baru muncul atau berkembang pada fase berikutnya. Temuan ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, pemerintah daerah cukup responsif dalam memperluas variasi intervensi. Kedua, orientasi program masih kuat pada perluasan jangkauan peserta. Tesis ini juga menunjukkan bahwa distribusi peserta antarprogram belum merata dan belum ada bukti kuat bahwa pelatihan tersebut secara konsisten menghasilkan wirausaha muda yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kuantitas program belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas tata kelola dan *outcome* kewirausahaan.

Pada dimensi teknologi komunikasi, seluruh aktor telah memanfaatkan media digital dalam aktivitas koordinasi maupun pengembangan usaha. Pemerintah daerah menggunakan WhatsApp dan

Zoom untuk rapat, penyebaran informasi program, dan evaluasi. Organisasi kepemudaan memakai grup pesan instan sebagai medium mobilisasi anggota dan komunikasi harian. Pelaku usaha muda dari sektor kuliner dan fashion memanfaatkan WhatsApp, Instagram, TikTok, dan *marketplace* untuk promosi, penjualan, dan jejaring usaha. Akademisi menggunakan platform digital untuk pelatihan, seminar, dan pendampingan. Meskipun penggunaan teknologi cukup intensif, pola komunikasi ini masih terpisah-pisah dan tidak terhubung dalam satu sistem bersama. Tidak ada platform kolaborasi terpadu yang memuat data pelaku usaha, kalender program, peluang kolaborasi, serta fungsi pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, koordinasi masih bergantung pada jejaring informal dan belum menjadi sistem kelembagaan.

Pada dimensi keterampilan digital, penelitian menemukan adanya kesenjangan kapasitas antaraktor. Sebagian pelaku usaha muda, terutama pada sektor fashion, relatif lebih adaptif dalam branding visual dan pemasaran digital. Namun, banyak pelaku usaha, khususnya pada level mikro atau pemula, masih lemah dalam pengelolaan bisnis digital yang lebih strategis, seperti analisis pasar, iklan berbayar, pengelolaan keuangan digital, dan optimalisasi platform. Pemerintah daerah dan akademisi telah menyediakan berbagai pelatihan, termasuk *digital marketing*, *marketplace onboarding*, seminar, dan inkubasi bisnis. Namun, pelaksanaan program tersebut belum merata dan belum konsisten dalam pendampingan pascapelatihan. Organisasi kepemudaan juga belum sepenuhnya memperoleh penguatan kapasitas yang berkelanjutan untuk menjalankan peran sebagai penghubung ekosistem.

Pada dimensi budaya organisasi, secara normatif semua pihak menyatakan terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menunjukkan dukungan terhadap kerja sama, akademisi memiliki mandat kelembagaan untuk bermitra melalui tridarma, dan pelaku usaha pada dasarnya sangat terbuka terhadap kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktik, kolaborasi masih dibatasi oleh ego sektoral, perbedaan ritme kerja, serta kekakuan birokrasi. Pelaku usaha, khususnya pada sektor kreatif, menilai bahwa pendekatan pemerintah masih terlalu administratif dan kurang fleksibel terhadap dinamika pasar. Organisasi kepemudaan juga menilai bahwa kolaborasi masih banyak bergantung pada inisiatif individual, belum menjadi pola kerja yang terlembagakan secara kuat.

Pada dimensi kepercayaan antar anggota, hubungan kerja antaraktor relatif baik, terutama pada pihak-pihak yang sudah lama berinteraksi. Akan tetapi, kepercayaan tersebut masih rapuh ketika berhadapan dengan aktor baru atau program yang tidak berkelanjutan. Pelaku usaha muda mengaitkan tingkat kepercayaan dengan konsistensi program, transparansi pelaksanaan, dan manfaat

nyata yang mereka rasakan. Artinya, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui komunikasi simbolik, tetapi harus ditopang oleh kejelasan peran, kesinambungan program, dan mekanisme evaluasi yang akuntabel.

Pada dimensi tujuan bersama, penelitian menemukan bahwa seluruh aktor pada dasarnya memiliki visi makro yang sejalan, yaitu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kemandirian ekonomi pemuda. Namun, keselarasan visi tersebut belum otomatis menghasilkan kesepakatan operasional yang kuat. Pemerintah cenderung berorientasi pada target program, akademisi pada pengembangan kapasitas dan inovasi, organisasi kepemudaan pada pemberdayaan pemuda, sedangkan pelaku usaha lebih menekankan profitabilitas, pasar, dan keberlanjutan bisnis. Ketidakselarasan orientasi ini menyebabkan program sering tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pelaku usaha bahkan menilai bahwa mereka belum cukup dilibatkan sejak tahap awal perencanaan program.

Berdasarkan sintesis temuan lapangan, model kolaborasi yang efektif untuk pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor perlu dibangun di atas lima dimensi yang saling terkait. Pertama, teknologi komunikasi harus ditransformasikan dari media komunikasi parsial menjadi platform digital terintegrasi. Kedua, peningkatan kapasitas digital harus berlangsung secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan inkubasi yang sesuai dengan kebutuhan sektoral. Ketiga, budaya organisasi perlu diarahkan pada keterbukaan, fleksibilitas, kemitraan, dan orientasi hasil. Keempat, kepercayaan harus dilembagakan melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kerja sama. Kelima, tujuan bersama harus diformalkan melalui dokumen kerja sama, *roadmap*, pembagian tugas, indikator kinerja, dan evaluasi berbasis data. Dalam model ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan, akademisi sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, pelaku usaha muda sebagai aktor inti, dan organisasi kepemudaan sebagai penghubung sosial antara program dan basis pemuda di lapangan.

## **Pembahasan**

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan wirausaha muda tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan pelatihan kewirausahaan semata. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam membentuk pola pikir, kreativitas, dan kesiapan generasi muda untuk masuk ke dunia usaha (Ahmad et al., 2023; Bauman & Lucy, 2021; Kim et al., 2020). Hasil penelitian di Kabupaten Bogor tidak menolak temuan tersebut, tetapi memperluasnya. Pendidikan dan pelatihan memang penting, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh apakah ia tertanam dalam tata kelola kolaboratif yang mampu menghubungkan pelatihan dengan

akses pasar, jejaring, pendampingan, dan kesinambungan program. Dengan kata lain, problem utama bukan hanya kekurangan keterampilan, melainkan juga belum terbangunnya arsitektur kolaborasi yang menopang pemanfaatan keterampilan itu secara berkelanjutan.

Temuan ini juga konsisten dengan studi Ahmed dan Ahmed (2021) serta Cueto et al. (2022) yang menunjukkan bahwa wirausaha muda di negara berkembang menghadapi hambatan digital, pasar, pembiayaan, dan dukungan institusional. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang berbeda. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya perlu dibaca sebagai problem individual pelaku usaha, tetapi sebagai gejala dari koordinasi kelembagaan yang belum matang. Ketika data aktor tidak terintegrasi, program tidak berkelanjutan, dan peran stakeholder tidak dirumuskan secara jelas, maka hambatan digital, lemahnya akses pasar, dan rendahnya kepercayaan akan terus berulang. Di sinilah letak urgensi perspektif tata kelola kolaboratif.

Dari sudut pandang *collaborative governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Kabupaten Bogor telah berjalan, tetapi belum memenuhi syarat efektivitas secara kelembagaan. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dalam kasus ini, proses komunikasi memang sudah ada, tetapi desain kelembagaan kolaborasi belum cukup kuat. Tidak tersedia mekanisme bersama yang mengatur alur informasi, integrasi program, pembagian peran, dan evaluasi. Akibatnya, inisiatif yang ada tetap bergerak secara sektoral dan lebih banyak bergantung pada relasi personal daripada sistem kolaborasi yang baku.

Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi lima faktor kolaborasi menurut Poon dan Zhang (2013). Akan tetapi, kontribusi penelitian ini terletak pada temuan bahwa kelima faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menentukan. Teknologi komunikasi yang tinggi tidak otomatis meningkatkan efektivitas kolaborasi bila tidak ditopang oleh tujuan bersama yang jelas. Pelatihan digital tidak akan berkelanjutan bila tidak disertai budaya organisasi yang terbuka dan kemitraan yang setara. Demikian pula, kepercayaan tidak akan tumbuh hanya dari intensitas pertemuan, tetapi dari konsistensi program dan hasil nyata yang dirasakan para aktor. Dengan demikian, efektivitas kolaborasi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi sistemik antar faktor, bukan akumulasi parsial dari masing-masing dimensi.

Dari perspektif teori jaringan, hubungan antarpelaku di Kabupaten Bogor masih bersifat parsial, episodik, dan belum terkonsolidasi dalam jejaring yang kuat. Provan dan Kenis (2008) menekankan bahwa tata kelola jaringan membutuhkan struktur, manajemen, dan efektivitas yang jelas. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aktor-aktor utama memang sudah ada, tetapi

koneksi antar mereka masih tidak merata. Pemerintah dan organisasi kepemudaan memiliki saluran komunikasi tertentu, pelaku usaha mempunyai jejaring pasar dan komunitasnya sendiri, dan akademisi berkontribusi dalam pelatihan atau seminar. Namun, belum ada simpul integratif yang membuat arus informasi, sumber daya, dan dukungan berjalan secara simultan. Dalam konteks ini, platform digital terpadu tidak semata dipahami sebagai perangkat teknologi, tetapi sebagai instrumen penguatan jejaring kolaborasi.

Temuan mengenai data pelatihan juga penting dibaca secara kritis. Pencapaian 3.945 peserta dalam tiga tahun menunjukkan adanya komitmen programatik, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan keberhasilan pengembangan wirausaha muda. Ketika keberhasilan program lebih banyak diukur dari jumlah peserta daripada keberlanjutan usaha, maka intervensi berisiko berhenti pada logika proyek. Penelitian ini karenanya menggeser fokus dari “berapa banyak pelatihan dilaksanakan” menjadi “bagaimana pelatihan dihubungkan dengan desain kolaborasi yang memungkinkan kelahiran usaha muda yang berdaya tahan”. Perubahan fokus ini merupakan kontribusi penting artikel terhadap diskursus pengembangan wirausaha muda di tingkat daerah.

Secara konseptual, novelty artikel ini terletak pada perumusan model tata kelola kolaboratif yang kontekstual, berbasis digital, dan operasional untuk pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor. Model ini memadukan lima dimensi utama, yaitu integrasi teknologi komunikasi, penguatan kapasitas digital berkelanjutan, pembentukan budaya kolaboratif, pelembagaan kepercayaan, dan formalisasi tujuan bersama. Berbeda dari studi terdahulu yang cenderung menekankan pendidikan, digitalisasi, atau strategi pengembangan UMKM secara terpisah, artikel ini menunjukkan bahwa pengembangan wirausaha muda memerlukan desain tata kelola yang menjahit seluruh elemen tersebut ke dalam satu ekosistem kolaboratif. Oleh karena itu, kontribusi artikel ini bukan hanya pada deskripsi masalah, tetapi pada penyusunan kerangka model yang dapat dijadikan dasar kebijakan dan praktik kolaborasi di tingkat pemerintah daerah.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi tata kelola multipihak dalam pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor telah berjalan, tetapi belum optimal karena masih bersifat terfragmentasi. Teknologi komunikasi telah digunakan secara intensif oleh pemerintah, organisasi kepemudaan, pelaku usaha muda, dan akademisi, namun belum didukung platform digital terintegrasi. Kapasitas digital antaraktor masih timpang, budaya organisasi masih dipengaruhi ego sektoral dan kekakuan birokrasi, kepercayaan belum sepenuhnya kokoh, dan tujuan bersama belum

diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang formal dan terukur. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menawarkan model tata kelola kolaboratif yang efektif melalui lima dimensi yang saling terkait, yaitu teknologi komunikasi terintegrasi, peningkatan kapasitas digital berkelanjutan, budaya kolaboratif, kepercayaan yang dilembagakan, dan tujuan bersama yang diformalkan. Model ini menempatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator, akademisi sebagai pusat pengetahuan dan inovasi, pelaku usaha muda sebagai aktor inti, serta organisasi kepemudaan sebagai penghubung sosial. Dengan model tersebut, pengembangan wirausaha muda di Kabupaten Bogor dapat diarahkan dari pola program yang parsial menuju ekosistem kewirausahaan yang lebih sinergis dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, A., Rahman, M., & Yusuf, H. (2023). Pendidikan kewirausahaan dan pola pikir generasi muda. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 11(2), 145–158. <https://doi.org/10.21009/jpek.112.05>
- Ahmed, S., & Ahmed, R. (2021). Digital entrepreneurship in the Philippines: Opportunities and challenges. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 28(3), 210–225. <https://doi.org/10.1108/JABES-01-2021-0015>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kewirausahaan Indonesia*. BPS RI.
- Bauman, A., & Lucy, C. (2021). Integrating entrepreneurship into education curricula: A global perspective. *Education + Training*, 63(7/8), 1020–1035. <https://doi.org/10.1108/ET-12-2020-0365>
- Ćoćkalo, D., et al. (2020). Youth entrepreneurship as a driver of economic development: A literature review. *Sustainability Journal*
- Cueto, J., Montalbo, E., & Galang, M. (2022). Entrepreneurial challenges in developing economies: Evidence from Ethiopia. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 27(1), 2250004. <https://doi.org/10.1142/S108494672250004X>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Kim, J., Lee, S., & Park, H. (2020). The impact of entrepreneurship education programs in South Korea. *Asia Pacific Education Review*, 21(2), 329–342. <https://doi.org/10.1007/s12564-019->

09615-4

- Kvale, S. (1996). *Interviews: An introduction to qualitative research interviewing*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (2016). *Designing qualitative research*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Poon, S., & Zhang, C. (2013). Critical factors for collaborative commerce adoption. *Journal of Electronic Commerce Research*
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Rizal, M., Pratama, A., & Nugroho, Y. (2022). Digital entrepreneurship in the era of technological disruption. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 21(3), 289–305.  
<https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.5>
- Singgih, J. A. (2020). Peran pengusaha muda dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 101–115. <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i2.41234>
- Siti, N., Raharja, S., & Putri, A. (2024). Strategi pengembangan UMKM di Indonesia dalam menghadapi era digital. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.22146/jkeb.78901>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sage Publications.